

**KUMPULAN PERATURAN TERKAIT PENANGGULANGAN
PENYEBARAN VIRUS CORONA**

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No.9 A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
6. Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19);
7. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
8. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Yang Meminta Adanya Realokasi Dan Refocussing Belanja Pada APBN Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-Ig)
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
13. Surat Edaran Nomor 2/SE/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
14. Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 3 Tahun 2020 Tentang Kewaspadaan Terkait Virus Corona (Covid-19)
15. Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ) bernomor 5 BPTJ Tahun 2020
16. Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pencegahan Penularan Pada Masyarakat Yang Memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Corona Virus Disease (Covid-19)
17. Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan Dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19);
18. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Menjaga Jarak Aman Antar Warga Dalam Bermasyarakat (Social Distancing Measure) Dalam Rangka Antisipasi Dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019
20. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
21. Pengumuman Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Tahun 2020 tentang Restrukturisasi (Keringanan) Nasabah Yang Mengalami Kesulitan Keuangan Akibat Penyebaran Virus Corona (Covid-19);

22. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-9/D.05/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Perusahaan Pembiayaan
23. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pencegahan Penularan Pada Masyarakat Yang Memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Coronavirus Disease (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
24. Keputusan Bersama Menteri agama, Menteri ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 391 Tahun 2020 Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020.
25. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
26. Seruan Gubernur DKI Jakarta No.9 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker Untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease (COVID-19)
27. Surat Menteri Perindustrian Nomor B/312/M-IND/IND/IV/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Tanggapan Darurat Pandemi COVID 19
28. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.86 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Bidang Usaha Tertentu Terkait Penanganan Wabah Covid-19
29. Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor 440/1/06/KESRA Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Lingkungan Tempat Ibadah Dan Lembaga Pendidikan
30. Pengumuman Direktur Jendral Kekayaan Intelektuan Nomor HKI-OT.02.02-12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pengumuman Direktur Jendral Kekayaan Intelektuan No.KI-OT.02.02-08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVI-19
31. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI

32. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/HK.00.7/04/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/Dj.Iii/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
33. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Bidang Usaha Tertentu Terkait Penanganan Wabah Covid-19
34. Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor 440/1/06/Kesra Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Lingkungan Tempat Ibadah Dan Lembaga Pendidikan
35. Pengumuman Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor Hki-Ot.02.02-12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pengumuman Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-Ot.02.02-08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid -19
36. Seruan Walikota Tangerang No.2 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker Untuk Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19)
37. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
38. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi Dan Penampungan Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Atau Penyakit Infeksi Emerging Di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker
40. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
41. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

42. Surat Edaran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 155/SE/2020 Tahun 2020 tentang Penutupan Sementara Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19)
43. Surat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 1588/-1.819.611 Tahun 2020 tentang Penghentian Layanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap), Antar Jemput Antar Provinsi (Ajap) Dan Pariwisata
44. Pengumuman Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Tahun 2020 tentang Restrukturisasi (Keringanan) Nasabah Yang Mengalami Kesulitan Keuangan Akibat Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
45. Pengumuman Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Tahun 2020 tentang Restrukturisasi (Keringanan) Nasabah Yang Mengalami Kesulitan Keuangan Akibat Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
46. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2627/SJ Tahun 2020 tentang Permintaan Data Kebutuhan Penanganan Covid19
47. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
48. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
49. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker
50. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
51. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

52. Keputusan Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 01/BNPB/2020, KEP-113/BC/2020 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelayanan Impor Barang Untuk Keperluan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
53. Surat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 1588/-1.819.611 Tahun 2020 tentang Penghentian Layanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap), Antar Jemput Antar Provinsi (Ajap) Dan Pariwisata
54. Pengumuman Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Tahun 2020 tentang Restrukturisasi (Keringanan) Nasabah Yang Mengalami Kesulitan Keuangan Akibat Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
55. Pengumuman Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Tahun 2020 tentang Restrukturisasi (Keringanan) Nasabah Yang Mengalami Kesulitan Keuangan Akibat Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
56. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2627/SJ Tahun 2020 tentang Permintaan Data Kebutuhan Penanganan Covid-19
57. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
58. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
59. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah
60. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 730/7835/MP/BKD Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
61. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 60/Satgas Covid19/Iii/2020 Tahun 2020 Perpanjangan Pelaksanaan Pembelajaran Di Rumah

62. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-07/BC/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Penelitian Importasi Barang Yang Menggunakan Skema Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional (Tarif Preferensi) Sebagai Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19)
63. Surat Edaran Walikota Bandung Nomor KT.01.05.039-DISNAKER/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 19
64. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-11/D.05/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Perusahaan Perasuransian
65. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-9/D.05/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Perusahaan Pembiayaan
66. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-10/D.05/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Dana Pensiun
67. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
68. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah
69. Keputusan Bersama Gubernur Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA, 05/SK/MDA-PROV BALI/III/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat Di Bali
70. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
71. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1629/UM.006/DRJD/2020 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) Di Bidang Transportasi Darat

72. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/KEP.199-HUKHAM/2020 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Di Jawa Barat
73. Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Tahun 2020
74. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference
75. Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 300/1787/SATPOLPP Tahun 2020 tentang Himbauan Penutupan Sementara Kegiatan Usaha (Usaha Jasa Makanan Dan Minuman, Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Serta Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi Dan Pameran)
76. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2020 Tahun 2020 tentang Pengawasan Dan Pelayanan Di Bidang Cukai Dalam Masa Tanggap Darurat Akibat Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
77. Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 800/1795/DISDIKPORA Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kegiatan Belajar, Mengajar Dan Bekerja Dari Rumah Dalam Upaya Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Karawang
78. Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 443/3718-SET.DISDIK Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Jawa Barat
79. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pencegahan Penularan Pada Masyarakat Yang Memiliki Risiko Tinggi Bi85. Surat Edaran Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 443/46/UM Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penutupan Sementara Fasilitas Umum Dan Penundaan Sementara Kegiatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
80. Surat Edaran Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 800/47/BKD Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
81. Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pencegahan Penularan Pada Masyarakat Yang Memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Coronavirus Disease (Covid-19)

82. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona
83. Surat Walikota Serang Nomor 440/252/PEMT/2020 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19
84. Surat Edaran Walikota Depok Nomor 420/142-HUK/DISDIK Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar Di Rumah Bagi Peserta Didik Paud/Tk/Ra, SD/Mi, SMP/Mts, SMA/SMK/Ma Dan Lembaga Pendidikan Non Formal Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Kota Depok
85. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 32/SE/2020 Tahun 2020 tentang Pembelajaran Di Rumah (Home Learning) Pada Masa Darurat Covid19
86. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)
87. Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
88. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker
89. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10-U/01/KP.05.1/3/2020 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dan Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
90. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
91. Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

92. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
93. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Terkait Upaya Peningkatan Kewaspadaan Atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
94. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
95. Surat Edaran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 160/SE/2020 Tahun 2020 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19)
96. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
97. Surat Edaran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 155/SE/2020 Tahun 2020 tentang Penutupan Sementara Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19)
98. Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Dki Jakarta Nomor 3590/Se/2020 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease
99. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
100. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019
101. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/215/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020
102. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/Se-100.Tu.03/III/2020 Tahun 2020 tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

103. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020
104. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/SE-100.TU.03/III/2020 Tahun 2020 tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
105. Surat Edaran Walikota Bekasi Nomor 43/2137/Parbud.Par Tahun 2020 tentang Penutupan Sementara Tempat Hiburan (Klab Malam, Cafe, Panti Pijat, Karaoke, Musik Hidup, Pub, Billyard, Panti Mandi Uap/Sauna/Spa, Arena Bermain Anak, Bioskop) Dan Tempat Wisata Serta Mice (Balai Pertemuan) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Pencegahan penyebaran Virus Corona)

